

# Orang Suku Laut dalam Tata Kelola Pesisir: Suku Laut di Kepulauan Riau

Marisa Elsera<sup>1</sup>, Ikma Citra Ranteallo<sup>2</sup>, Idham Irwansyah Idrus<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Sosiologi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, [marisaelsera@umrah.ac.id](mailto:marisaelsera@umrah.ac.id)

<sup>2</sup>Sosiologi, Universitas Udayana, [ikma\\_citra@unud.ac.id](mailto:ikma_citra@unud.ac.id)

<sup>3</sup>Sosiologi, Universitas Negeri Makassar, [idham.irwansyah@unm.ac.id](mailto:idham.irwansyah@unm.ac.id)

## ABSTRAK

*Pembangunan pesisir dalam agenda Sustainable Development Goals (SDGs) di Asia Tenggara semakin berfokus pada penguatan ekonomi maritim melalui pariwisata, konservasi laut, industrialisasi pesisir, dan pengembangan Kawasan Strategis Nasional (PSN). Namun, implementasi pembangunan berkelanjutan terkadang gagal mempertimbangkan keadilan sosial bagi komunitas adat, khususnya Orang Suku Laut (OSL) di Kepulauan Riau. Sebagai kelompok yang memiliki ikatan historis, sosiologis, dan budaya dengan laut, Orang Suku Laut (OSL) menghadapi tekanan akibat perubahan tata kelola pesisir. Salah satu perkembangan tersebut adalah proyek PSN, yang telah menyebabkan pemindahan pemukiman, pembatasan akses ke wilayah laut, dan gangguan terhadap mata pencaharian komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembangunan pesisir yang memengaruhi akses Orang Suku Laut (OSL) terhadap ruang hidup dan sumber daya mereka, serta partisipasi mereka dalam tata kelola pesisir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang mencakup wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Penelitian ini menyoroti adanya pembatasan akses ke wilayah laut akibat proyek-proyek pembangunan, marginalisasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, serta kurangnya partisipasi masyarakat adat dalam tata kelola pesisir. Kondisi-kondisi tersebut memperparah kerentanan sosial-ekonomi dan mengancam keberlanjutan identitas budaya Orang Suku Laut (OSL).*

**Kata kunci:** Suku Laut; Proyek Strategis Nasional (PSN); Pengucilan Sosial; Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs); Pembangunan Berkelanjutan; Ekologi Politik

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan pesisir dalam agenda Sustainable Development Goals (SDGs) di Asia Tenggara mengarah pada penguatan ekonomi maritim melalui pariwisata bahari, konservasi laut, industrialisasi pesisir dan pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) (Alamsyahbana & Chartady, 2025). Kebijakan PSN diambil demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing kawasan maritim (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023). Orientasi pembangunan yang berfokus pada investasi dan infrastruktur seringkali mengabaikan dimensi keadilan sosial bagi masyarakat adat pesisir yang bergantung pada laut sebagai ruang hidup (Parsons et al., 2021). Pembangunan pesisir tidak hanya dipahami sebagai proses ekonomi tetapi juga sebagai arena

relasi kuasa yang menentukan akses terhadap ruang, sumber daya dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir (Evans et al., 2023).

Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah strategis pembangunan maritim nasional yang mengalami percepatan pembangunan kawasan industri, pariwisata dan PSN (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, 2025). Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pembangunan pesisir menjadi bagian penting dalam agenda ekonomi laut berkelanjutan Indonesia, khususnya dalam mendukung SDGs poin 14 (Iskandar, 2020). Berbagai proyek pembangunan di wilayah pesisir seperti kawasan industri dan PSN di Bintan dan Batam memunculkan persoalan relokasi pemukiman, pembatasan wilayah tangkap, kerusakan ekosistem laut dan ancaman terhadap situs budaya masyarakat adat (Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia, 2025). Dua sisi mata pisau dari pembangunan ini mengakibatkan ketegangan antara agenda pembangunan ekonomi maritim dengan keberlanjutan sosial budaya masyarakat adat.

Penelitian ini menggunakan perspektif ekologi politik untuk memahami relasi antara pembangunan pesisir, kekuasaan dan akses masyarakat adat terhadap sumber daya laut. Ekologi politik memandang bahwa pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik, ekonomi dan relasi kuasa yang mempengaruhi distribusi akses terhadap ruang hidup masyarakat. Negara memiliki posisi dominan dalam menentukan kebijakan tata ruang dan pemanfaatan wilayah laut, sementara masyarakat adat berada pada posisi yang subordinat. Ketidakberdayaan masyarakat adat menghadapi kebijakan pembangunan oleh pemerintah berdampak pada pengucilan sosial (Elsera, Wisadirana, Edi Kuswandoro, et al., 2024).

Masyarakat adat yang dimaksud dalam penelitian ini memiliki karakteristik asal-usul leluhur secara turun temurun hidup di wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi politik, budaya dan sosial (Agung dalam Nurohman & Gunawan, 2019). Orang Suku Laut (OSL) di Kepulauan Riau dalam pandangan Sosiologis dan Antropologis layak disebut sebagai salah satu Masyarakat Adat karena terkategori sebagai Indigenous Maritime People (Chou, 2016). Meskipun begitu belum ada peraturan hukum yang menyebut bahwa OSL adalah masyarakat adat di Indonesia. OSL memiliki posisi strategis dalam lanskap maritim Asia Tenggara (Boutry et al., 2024). Pemerintah Indonesia memandang masyarakat OSL yang hidup nomaden sebagai kelompok yang perlu dimodernisasi karena dianggap hasur hidup menetap di darat, memiliki pekerjaan di darat dan mobilitas dianggap menghambat pembangunan (Chou, 2024). Padahal mobilitas merupakan bagian sistem adaptasi OSL yang telah berkembang selama berabad-abad (Elsera et al., 2025). Akibat dari cara pandang ini membuat OSL mengalami pengucilan dan marginalisasi kebijakan serta ancaman identitas budaya (Elsera et al., 2022). Orang Suku Laut sebagai komunitas maritim tradisional di Kepulauan Riau menghadapi beragam persoalan yang diakibatkan oleh dinamika pembangunan pesisir. (Elsera, Wisadirana, Maksu, et al., 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami persoalan dinamika pembangunan pesisir dan dampaknya terhadap Masyarakat adat Orang Suku Laut (OSL) di Kepulauan Riau. Penelitian ini berfokus pada kebijakan pembangunan wilayah

pesisir dan proyek PSN mempengaruhi akses Orang Suku Laut terhadap ruang hidup dan sumber daya laut di Kepulauan Riau

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam dinamika Pembangunan pesisir dan dampaknya terhadap Masyarakat adat Orang Suku Laut (OSL) di Kepulauan Riau. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya menggali pengalaman sosial, bentuk pengucilan serta relasi kuasa yang dialami Masyarakat adat dalam proses tata Kelola pesisir. Studi kasus digunakan untuk memfokuskan analisis pada Orang Suku Laut (OSL) yang terdampak Pembangunan pesisir dan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga dapat diperoleh pemahaman kontekstual mengenai perubahan ruang hidup, akses sumber daya laut dan partisipasi Masyarakat dalam kebijakan pembangunan. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah pesisir Kepulauan Riau yang menjadi Kawasan Pembangunan maritim dan Proyek Strategis Nasional (PSN) khususnya wilayah permukiman Orang Suku Laut (OSL) yang mengalami perubahan tata kelola pesisir seperti Rempang dan Kawal. Informan terdiri dari tetua Orang Suku Laut (OSL), pemuda Suku Laut, pemerintah daerah yang terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan dan analisis dokumen.

## 3. ANALISIS DATA

Orang Suku Laut dan masyarakat adat di wilayah pesisir dan PSN di Kepulaun Riau sering mengalami pengucilan sosial dalam proses tata kelola wilayah pesisir akibat dominasi negara dan korporasi dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Orang Suku Laut hanya dijadikan objek pembangunan tanpa melibatkan secara aktif dalam proses perencanaan maupun pengelolaan sumber daya pesisir. Orang Suku Laut di Kepulauan Riau menghadapi pembatasan akses terhadap wilayah tangkap tradisional (Ariando, 2026). Akibat pembangunan kawasan industri, pariwisata dan Proyek Strategis Nasional (PSN) terjadi ketimpangan akses. Padahal, Pembangunan negara dan kebijakan teritorial selanjutnya tidak mengubah relasi OSL dengan wilayah laut dan mengakomodir hak-hak kolektif (Chou, 2010).

Relasi kuasa yang timpang terlihat ketika kepentingan investasi lebih diutamakan dibanding keberlanjutan ruang hidup masyarakat adat. Akibatnya, masyarakat adat terancam mengalami relokasi permukiman, perubahan mata pencaharian hingga menurunnya akses terhadap sumber daya laut yang menjadi basis utama kehidupan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola pesisir belum sepenuhnya menghadirkan prinsip keadilan sosial bagi komunitas adat pesisir.

Perspektif ekologi politik menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dipisahkan dari relasi kekuasaan antar negara, pasar dan masyarakat lokal. Negara sebagai pihak dominan memiliki peran besar dalam menentukan pemanfaatan ruang pesisir melalui kebijakan investasi, reklamasi, Kawasan industri dan pembangunan infrastruktur maritim.

Orang Suku Laut sebagai Masyarakat adat sering berada di posisi lemah dalam menghadapi ekspansi Pembangunan. Kebijakan Pembangunan yang sering hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi menyebabkan ruang hidup Masyarakat adat semakin sempit dan akses terhadap laut menjadi terbatas. Kondisi ini merupakan bentuk ketimpangan ekologis-politik, negara sebagai pihak dominan memiliki kekuatan ekonomi dan politik memiliki control lebih besar atas sumber daya alam. Pembangunan pesisir tidak hanya menjadi persoalan ekonomi tetapi juga konflik akses, kekuasaan dan hak masyarakat adat terhadap wilayah tradisional.

Pembangunan yang massif di Kepulauan Riau tidak hanya berdampak pada ekonomi masyarakat adat tetapi juga mengancam keberlanjutan identitas budaya. Laut bukan hanya ruang ekonomi tetapi identitas sosial dan budaya yang turun temurun. Relokasi pemukiman ke daratan dan pembatasan aktivitas melaut menyebabkan perubahan pola hidup Masyarakat yang sebelumnya sangat bergantung pada mobilitas laut. Generasi muda OSL mulai mengalami pergeseran nilai budaya akibat berkurangnya keterlibatan dalam aktivitas maritim tradisional. Selain itu, hilangnya ruang hidup juga menyebabkan pengetahuan lokal mengenai laut, navigasi dan pengelolaan sumber daya pesisir semakin terancam. Padahal, identitas masyarakat maritim sangat dipengaruhi oleh hubungan ekologis dengan laut sehingga perubahan ruang hidup dapat mengakibatkan melemahnya identitas budaya komunitas pesisir.

### 3.1. Kebijakan Pembangunan Pesisir dan PSN Harus Berkeadilan Bagi Masyarakat Adat

Pembangunan pesisir dan PSN seharusnya dilaksanakan dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial. Pemerintah perlu mengintegrasikan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dalam setiap proses Pembangunan yang berkaitan dengan wilayah adat pesisir, sehingga masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Pengakuan hukum terhadap wilayah adat dan ruang tangkap tradisional Masyarakat pesisir perlu diperkuat melalui kebijakan tata ruang yang partisipatif. Pembangunan ekonomi maritim juga perlu berbasis community-based coastal management dengan melibatkan Masyarakat adat sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya pesisir.

Tata Kelola pesisir yang inklusif dan berkeadilan sosial di Kepulauan Riau memerlukan pengakuan yang lebih kuat terhadap hak Masyarakat adat, khususnya hak atas wilayah adat laut dan perlindungan sosial-ekologis Orang Suku Laut sebagai komunitas maritim. Pembangunan pesisir seharusnya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan investasi, tetapi juga menjamin partisipasi Masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pengambilan Keputusan melalui model pembangunan yang partisipatif dan setara. Implementasi SDGs perlu diintegrasikan dengan prinsip keadilan sosial, penghormatan terhadap identitas budaya dan perlindungan hak masyarakat adat agar tata kelola pesisir tidak menghasilkan eksklusi sosial dan konflik ruang. Diperlukan kebijakan pesisir yang inklusif melalui penguatan pengakuan hukum bagi masyarakat adat, keterlibatan komunitas lokal dalam tata Kelola sumber daya laut, serta pembangunan yang mempertimbangkan keberlanjutan sosial, budaya dan ekologis masyarakat pesisir.

Implementasi SDGs di wilayah pesisir tidak dapat hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik (infrastruktur) tetapi harus mempertimbangkan keadilan

sosial, pengakuan hukum Masyarakat adat dan keberlanjutan hubungan sosial-ekologis antara manusia dan laut. Oleh sebab itu, penting melakukan pendekatan inklusi. Dengan demikian, Pembangunan pesisir dapat mendukung tujuan SDGs tanpa menciptakan pengucilan sosial bagi Orang Suku Laut karena telah mewujudkan keseimbangan antara Pembangunan ekonomi, keberlanjutan lingkungan dan perlindungan identitas budaya.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan yang dialami Orang Suku Laut di Kepulauan Riau disebabkan oleh Pembangunan pesisir dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi dan investasi disbanding perlindungan Masyarakat adat. Kondisi tersebut memunculkan pembatasan akses laut, relokasi pemukiman, marginalisasi dalam pengambilan kebijakan serta melemahnya identitas budaya Masyarakat pesisir. Diperlukan kebijakan Pembangunan pesisir yang lebih inklusif dan partisipatif melalui pengakuan hak Masyarakat adat, perlindungan wilayah tangkap tradisional serta pelibatan Masyarakat dalam proses perencanaan Pembangunan.

#### REFERENSI

- Alamsyahbana, M. I., & Chartady, R. (2025). Implementation of SDG 14 and Blue Economy Policies in Southeast Asia: A Comparative Policy Review. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(3), 603–616. <https://doi.org/https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i3.3384>
- Ariando, W. (2026). *Human Rights and the Environment: A Southeast Asian Perspective* (Vol. 1). SHAPE-SEA Secretariat Institute of Human Rights and Peace Studies (IHRP). [www.shapesea.com](http://www.shapesea.com)
- Boutry, M., Chou, C., Ivanoff, J., & Sather, C. (2024). Introduction: Seeing Southeast Asia through a Sea-Nomadic Lens. *SOJOURN: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 39(1), 28–37.
- Chou, C. (2010). The Orang Suku Laut of Riau, Indonesia: The Indalienable Gift of Territory. Routledge.
- Chou, C. (2016). The water world of the orang suku laut in southeast Asia. *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 4(2), 265–282. <https://doi.org/10.1017/trn.2016.9>
- Chou, C. (2024). The Orang Suku Laut: The Art of Resilience. *Sojourn*, 39(1), 125–153. <https://doi.org/10.1355/sj39-1f>
- Elsera, M., Wahyuni, S., Syafitri, R., & Arieta, S. (2022). Self-Identification of Sea Tribe. *Eurasia: Economics&Business*, 12(66), 118–5. [https://econeurasia.com/issue-2022-12/article\\_13.pdf](https://econeurasia.com/issue-2022-12/article_13.pdf)
- Elsera, M., Wisadirana, D., Edi Kuswandro, W., Fatma Chawa, A., & Syafitri, R. (2024). The Suku Laut View of the Settlement Program in Lingga Regency. *JSA (Jurnal Sosiologi Andalas)*, 10(2), 187–202. <https://doi.org/https://doi.org/10.25077/jsa.10.2.79-94.2024>
- Elsera, M., Wisadirana, D., Maksum, A., Chawa, A. F., & Nurhadi, I. (2025). Economic adaptation strategies to the relocation policy of Suku Laut in Lingga, Kepulauan Riau Province, Indonesia. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 8(4), 2755–2762. <https://doi.org/10.53894/ijirss>
- Elsera, M., Wisadirana, D., Maksum, A., Fatma Chawa, A., Kanto, S., Rozuli, A. I., Nurhadi, I., Casiavera, C., & Ariando, W. (2024). Religious and Maritime Cultural Integration of the Suku

- Laut in Riau Islands, Indonesia. *BIO Web of Conferences*, 134, 07004. <https://doi.org/10.1051/bioconf/202413407004>
- Evans, L. S., Buchan, P. M., Fortnam, M., Honig, M., & Heaps, L. (2023). Putting coastal communities at the center of a sustainable blue economy: A review of risks, opportunities, and strategies. *Frontiers in Political Science*, 4.
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan* (Ach. F. Suja'ie & I. Augusta, Eds.; November 2020, Vol. 1). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2023, September 13). *PSN Terbukti Tingkatkan Daya Saing dan Dorong Pemerataan Pembangunan Wilayah*. [https://Ekon.Go.Id/Publikasi/Detail/5378/Psn-Terbukti-Tingkatkan-Daya-Saing-Dan-Dorong-Pemerataan-Pembangunan-Wilayah?Utm\\_source=chatgpt.Com](https://Ekon.Go.Id/Publikasi/Detail/5378/Psn-Terbukti-Tingkatkan-Daya-Saing-Dan-Dorong-Pemerataan-Pembangunan-Wilayah?Utm_source=chatgpt.Com).
- Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia. (2025, March 21). *Nestapa Suku Laut Kawal Laut, Terancam PSN di Pesisir Bintan*. [https://Www.Siej.or.Id/Id/Ekuatorial/Nestapa-Suku-Laut-Kawal-Laut-Terancam-Psn-Di-Pesisir-Bintan?Utm\\_source=chatgpt.Com](https://Www.Siej.or.Id/Id/Ekuatorial/Nestapa-Suku-Laut-Kawal-Laut-Terancam-Psn-Di-Pesisir-Bintan?Utm_source=chatgpt.Com).
- Nurohman, T., & Gunawan, H. (2019). Konstruksi Identitas Nasional Pada Masyarakat Adat: (Studi Kasus Di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya). *Journal of Politics and Policy*, 1(2), 125–154. <https://doi.org/10.21776/UB.JPPOL.2019.001.02.3>
- Parsons, M., Taylor, L., & Crease, R. (2021). Indigenous Environmental Justice within Marine Ecosystems: A Systematic Review of the Literature on Indigenous Peoples' Involvement in Marine Governance and Management. *Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)*, 13(8). <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su13084217>
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, Pub. L. 12, Sekretariat Negara Republik Indonesia (2025).